

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan umum.¹ Pemilihan kepala daerah merupakan agenda demokrasi untuk memilih kepala daerah yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Demokratis dalam hal ini dimaknai sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dimana di dalamnya diatur mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah serentak. Hanya saja undang-undang itu belum lengkap sehingga ada hal baru yang diluar prediksi terjadi ditengah-tengah proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Akibat dari keluarnya undang-undang tersebut, maka pemilihan kepala daerah serentak diselenggarakan perdana pada tahun 2015. Ada fenomena menarik ketika pemilihan kepala daerah serentak diselenggarakan. Sejumlah calon pemilihan kepala daerah membuat manuver mencengangkan, ada yang menghilang sampai pendaftaran, bahkan ada juga yang mundur di tengah jalan sehingga muncul adanya calon tunggal. Ada beberapa daerah

¹ Hardiyanto, dkk, "Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)", *Varia Justicia*, Vol 12, No. 1, Oktober 2016, hlm 206

yang hanya mempunyai satu calon/calon tunggal sehingga ada kemungkinan pemilihan ditunda karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mensyaratkan bahwa pemilihan kepala daerah dapat berjalan apabila minimal ada dua calon.

Fenomena pasangan calon tunggal masih menjadi polemik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Para pengamat menilai kondisi seperti itu disebabkan terlalu tingginya elektabilitas seorang calon di daerah. Dengan menganalisis elektabilitas, para kandidat tentu tidak mau kalah atau rugi karena biaya Pemilihan kepala daerah sangat mahal. Hanya calon yang mempunyai modal kuat dan elektabilitas tinggi yang tidak mau mundur. Jika hanya sekedar coba-coba, mereka lebih memilih mundur karena biaya Pemilihan kepala daerah terlalu mahal. Misalnya kasus di Surabaya, Jawa Timur. Bahwa Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya mempunyai elektabilitas yang sangat tinggi di daerah tersebut. Hal itu pula yang diduga membuat sejumlah kompetitor ‘balik badan’ untuk melawannya.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan syarat paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon kepala daerah. KPU juga menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam peraturan KPU tersebut dinyatakan bahwa dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.³

²R. Nazriyah, “Calon Tunggal dalam Pemilihan kepala daerah Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hlm 381

³ *Ibid*, hlm 382

Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya. Tidak menutup kemungkinan dalam pemilihan serentak berikutnya hanya ada satu calon tunggal kembali sehingga hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak akan terpenuhi. Berkaitan dengan hal tersebut, baik UU pemilihan kepala daerah maupun Peraturan KPU belum mengatur ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan jika terjadi fenomena calon tunggal. Akhirnya para pihak yang merasa dirugikan hak-haknya mengajukan uji materi UU pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi.⁴

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap UUD NRI Tahun 1945 memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah masih tetap bisa berlangsung tanpa kehilangan sifat demokratisnya meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Pemilihan dilaksanakan dengan mekanisme yang lazim dikenal oleh masyarakat dengan nama referendum, yaitu dengan cara masyarakat diminta untuk memilih setuju atau tidak setuju dengan pasangan calon tunggal. Pemilihan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon merupakan solusi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi akibat dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Hal ini yang membuat angka calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 meningkat signifikan dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah tahun 2015 dan tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum mencatat, dalam pemilihan kepala daerah

⁴ *Loc. Cit*

tahun 2018, terdapat sebelas daerah yang hanya memiliki calon tunggal, sedangkan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 terdapat sembilan daerah yang terdapat calon tunggal, dan pemilihan kepala daerah tahun 2015 terdapat tiga daerah dengan calon tunggal. Pada tahun 2018, salah satu daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal adalah Kota Tangerang. Hal ini lah yang melatarbelakangi penulis ingin mengkaji penyelenggaraan pemilihan Walikota di Kota Tangerang dengan calon tunggal tahun 2018 ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya fenomena pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?
2. Bagaimana pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan calon tunggal yang diselenggarakan di Kota Tangerang tahun 2018 ini?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedaulatan Rakyat (Demokrasi).

Ketika membicarakan Pemilu, tidak dapat dihindari untuk menguraikan arti penting konsep demokrasi. Keduanya memiliki relasi erat yang tidak dapat dipisahkan pengkajiannya. Menggunakan istilah Arbi Sanit⁵, Pemilu merupakan institusi yang mengefektifkan demokrasi. Ketentuan UUD 1945 mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilu di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Dalam kerangka negara demokrasi, pelaksanaan Pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial. Peran sentral Pemilu ini terlihat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam konstitusi negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) memberikan jaminan bahwa Pemilu adalah salah satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Artinya, Pemilu merupakan

⁵ Arbi Sanit, 2009, *Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik* dalam Andy Ramses M (edt), *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, hlm 213.

pranata wajib dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi memberikan arah dan mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Pemilu yang akan dilaksanakan.⁶

Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, Pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Pemilu merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi, karena melalui Pemilu, aspirasi rakyat untuk menentukan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut dapat dipandang juga sebagai wujud partisipasi dalam proses pemerintahan, sebab melalui lembaga masyarakat ikut menentukan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan pemimpin terpilih. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan bagaimana cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.⁷

Dalam sebuah negara dimana masyarakat majemuk, kedaulatan rakyat tidak dapat dilakukan secara murni, namun diperlukan perwakilan. Pelaksanaan kedaulatan rakyat semacam ini disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam demokrasi perwakilan ini yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah para wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat atau bisa juga disebut parlemen. Para wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat dan merekalah yang kemudian menentukan corak dan jalannya pemerintahan suatu negara, serta tujuan apa yang hendak dicapai, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam waktu yang panjang. Hal ini lah yang dikatakan Rousseau sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui kehendak hukum (*volunte generale*). Agar wakil-wakil rakyat itu benar-benar dapat bertindak atas

⁶ H.M Soerya Respationo, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral", *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 43, No. 3, Juli 2013, hlm 356

⁷ *Ibid*, hlm 357

nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan oleh rakyat sendiri, yaitu melalui Pemilu.⁸

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan kedaulatan ini dilaksanakan dengan memilih orang-orang tertentu untuk mengisi jabatan tertentu, yaitu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.⁹ Harris G. Warren menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka.¹⁰ Menurut Ramlan, Pemilihan Umum diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.¹¹

Pemilihan Umum dilaksanakan di Indonesia untuk memilih anggota lembaga perwakilan, presiden dan wakil presiden. Konstitusi dalam Pasal 22E UUD 1945 setelah perubahan mengatur ketentuan tentang Pemilu secara jelas dan detail, sebagai berikut: 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih

⁸*Ibid*

⁹ A. Rahman H.I, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 147.

¹⁰ Haryanto, 1984, *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta, Liberty, hlm 81.

¹¹ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Grasindo, hlm 181.

anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.¹²

Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 setelah perubahan dijabarkan kedalam beberapa undang-undang, seperti: Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. Asas-asas Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sesudah perubahan, pemilihan umum menggunakan asas-asas, sebagai berikut:

a. Langsung.

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

b. Umum.

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilihan umum. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

c. Bebas.

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara

¹² Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Desember 2014, hlm 244.

dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia.

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap penyelenggara pemilihan umum, aparat pemerintah, peserta pemilihan umum, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilihan umum dan peserta pemilihan umum mendapat peralatan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

3. Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum ada empat, yaitu:¹³

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.

¹³ Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 276.

- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

C. Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pemilihan umum adalah peristiwa politik yang kompleks. Kompleksitas itu tercermin dari jumlah jabatan yang dipilih, sistem pemilihan yang digunakan, dan manajemen pelaksanaan tahapan. Dalam konteks Indonesia masalahnya menjadi lebih rumit: pertama, jumlah pemilih yang 186 juta tersebar di wilayah geografis yang berbeda-beda sehingga volume dan varian pekerjaan membesar; kedua, penyelenggara terdiri dari tiga lembaga sehingga kompetisi tidak hanya terjadi antarpeserta pemilu tetapi juga anatarpenyelenggara pemilu; dan ketiga, jalur penyelesaian hukum panjang dan berbelit sehingga apapun yang diputuskan selalu menimbulkan ketidakpuasan. Kompleksitas pemilu di Indonesia memang tak terhindarkan. Negara ini menggunakan sistem pemerintahan presidensial, sehingga tidak hanya membutuhkan pemilu parlemen nasional tetapi juga pemilu presiden. Hal ini berbeda dengan negara-negara penganut sistem pemerintahan parlementer di mana hanya membutuhkan satu kali pemilu, yakni pemilu parlemen, selanjutnya parlemen hasil pemilu itu yang akan menunjuk perdana menteri dan kabinet. Kompleksitas pemilu di Indonesia merambah ke provinsi dan kabupaten/kota, karena sistem pemerintahan presidensial diduplikasi di provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya di tingkat lokal tidak hanya digelar pemilu parlemen lokal tetapi juga pemilihan atau pemilu kepala daerah (Pemilihan kepala daerah).¹⁴

Pasca Perubahan UUD 1945 sepertinya hanya ada tiga pemilu, yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah. Namun sesungguhnya dalam kurun lima tahun bisa digelar tujuh pemilu: pemilu legislatif, pemilu presiden putaran

¹⁴ Indra Pahlevi, dkk, 2015, *Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, hlm iii

pertama, pemilu presiden putaran kedua, pemilu gubernur putaran pertama, gubernur putaran kedua, pemilu bupati/walikota putaran pertama, dan pemilu bupati/walikota putaran kedua. Situasi ini tidak hanya membuat pemilih bosan, tetapi partai politik dan politisi juga kehilangan banyak waktu untuk mengurus rakyat dan konstituen. Penyelenggaraan pemilu yang berkali-kali tidak hanya menjadikan dana yang ditanggung negara berlipat-lipat, tetapi juga menyebabkan politik biaya tinggi yang harus ditanggung politisi. Alasan terakhir ini melatari banyak pejabat publik terlibat korupsi. Oleh karena itu, setelah Pemilu 2004, yang terdiri dari pemilu legislatif, pemilu presiden putaran pertama, dan pemilu presiden putaran kedua, lalu diikuti gelombang pertama Pemilihan kepala daerah sepanjang 2005-2008, muncul gagasan untuk menyelenggarakan pemilu serentak. Maksudnya adalah untuk menyederhanakan atau mengurangi jumlah penyelenggaraan pemilu dalam kurun lima tahun. Dalam pengertian ini pemilu serentak sesungguhnya bukan hal baru. Pemilu legislatif sendiri sesungguhnya pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota.¹⁵

Pemilihan kepala daerah serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pemilihan kepala daerah juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pemilihan kepala daerah yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik. Meskipun demikian, dalam praktiknya Pemilihan kepala daerah

¹⁵ *Ibid*, hlm iv

melahirkan berbagai konflik yang di antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta Pemilihan kepala daerah dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku. Pemilihan kepala daerah serentak sebagai agenda politik nasional menuju demokratisasi dapat berjalan secara substansi dan tidak sekedar ritual prosedur semata.¹⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”. Selain itu, juga dikuatkan dan dipertegas dengan Pasal 3 undang-undang tersebut: “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Kata “serentak” yang terdapat dalam pasal tersebut seringkali menimbulkan efek yang mengagetkan. Begitu pula ketika kata serentak disandingkan dengan pemilihan kepala daerah, maka jadilah pemilihan kepala daerah serentak. Kata “serentak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan kata “serentak” sebagai berikut: (1) bersama-sama (tentang gerakan dan waktunya); (2) seketika itu juga, spontan, serta merta. Berdasarkan definisi itu, pengertian yang cocok untuk pemilihan kepala daerah serentak adalah butir (1), yaitu “bersama-sama (tentang gerakan dan waktunya)”. Bukan butir (2) sebab pemilihan kepala daerah serentak ini

¹⁶ Achmad Arifulloh, “Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, No. 2, Mei - Agustus 2015, hlm 302

tidak diselenggarakan secara spontan atau serta merta, melainkan melalui perencanaan dan persiapan yang matang.¹⁷

Penyelenggaraan pemilu daerah serentak seluruh daerah sesungguhnya sama dengan penyelenggaraan pemilu daerah secara nasional. Terdapat beberapa kelebihan atas pemilu daerah berskala nasional ini:¹⁸

Pertama, format ini memaksimalkan fungsi pemilu sebagai sarana menjaga integrasi politik nasional, karena pertimbangan-pertimbangan politik nasional dapat mempengaruhi proses dan hasil pemilu daerah;

Kedua, format ini menjadikan agenda politik lebih jelas, yakni dalam kurun lima tahun terdapat dua kali pemilu di seluruh Indonesia, sehingga hal ini tidak saja mengurangi ketegangan politik di masyarakat, tetapi juga memudahkan perencanaan kegiatan ekonomi dan sosial budaya;

Ketiga, menyederhanakan agenda parpol, karena mereka hanya dua kali terlibat urusan pemilu dalam kurun lima tahun, sehingga waktunya bisa lebih banyak digunakan untuk mengurus anggota atau konstituen.

Namun pemilu daerah serentak nasional juga memiliki kelemahan, di antaranya format ini memungkinkan pemilih kehilangan perhatian terhadap isu-isu daerah, karena terpengaruh oleh isu-isu nasional yang dikampanyekan paarpol. Masalah kedua terkait dengan penyesuaian jadwal, mengingat jadwal Pemilihan kepala daerah selama ini berserakan waktunya, sehingga tidak mudah untuk menyatukan dalam pemilu daerah serentak nasional. Dalam hal ini terdapat dua pilihan langkah: pertama, penyesuaian dilakukan secara berlahan-lahan sehingga pemilu daerah serentak nasional baru tercapai dalam kurun tiga atau empat putaran pemilu; atau kedua,

¹⁷ Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pemilihan kepala daerah Serentak*, Jakarta, Expose (PT Mizan Publika), hlm 51

¹⁸ Ramlan Surbakti, dkk, 2011, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hlm 61

penyesuaian dilakukan dalam sekali putaran sehingga terjadi perubahan jadwal masa jabatan kepala daerah secara besar-besaran.

Sementara itu apabila pemilu daerah dilakukan secara serentak per provinsi, masih tersisa pertanyaan: pemilu daerah serentak per provinsi tersebut akan selesai dalam kurun waktu berapa lama, mengingat jumlah provinsi di Indonesia mencapai 34. Jika pemilu daerah selesai dalam kurun waktu satu tahun, hal ini secara signifikan menyederhanakan agenda politik nasional, meskipun dalam kurun waktu satu tahun itu rata-rata setiap bulan terdapat dua sampai tiga kali pemilu daerah. Akan tetapi jika pemilu daerah itu berlangsung dalam kurun waktu dua atau tiga tahun, penyederhanaan jadwal pemilu tidak terjadi, sehingga kesibukan parpol dalam memadamkan konflik internal parpol akibat pencalonan tetap berlangsung.

Kelebihan pemilu daerah per provinsi adalah terfokusnya isu daerah, sehingga pemilih dapat menggunakan rasionalitasnya untuk memilih calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif yang diperkirakan mampu memecahkan masalah-masalah konkret yang dihadapi sehari-hari. Akan tetapi kelebihan ini tetap tidak mengurangi masalah penyesuaian jadwal, mengingat Pemilihan kepala daerah pada masing-masing provinsi selama ini juga berserakan waktunya. Akibatnya, usaha menyatukan beragam jadwal Pemilihan kepala daerah dalam satu pemilu daerah tetap membutuhkan waktu lama jika dilakukan bertahap, atau membutuhkan banyak perubahan jadwal masa jabatan jika ingin dilakukan secepatnya.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak telah diakomodasi melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015. KPU mulai menindaklanjuti klausul pemilihan kepala daerah serentak yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. KPU memutuskan untuk mengawali

pemilihan kepala daerah serentak pada September 2015. September dipilih karena dinilai paling tepat kata ketua KPU Husni Kamil Malik, ada konsekuensi atas penetapan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada September 2015. Salah satunya, ada sejumlah kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum September. Solusinya Kementerian dalam Negeri akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) kepala daerah hingga pemilihan kepala daerah serentak dilangsungkan.¹⁹

D. Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Komisi Pemilihan Umum pada 171 daerah resmi menutup pendaftaran pasangan calon untuk Pemilihan kepala daerah Serentak 2018 pada pukul 24.00 tanggal 10 Januari 2018. Pendaftaran ini dibuka selama tiga hari, yakni sejak 8 Januari 2018. Satu fakta menarik muncul pada tahapan pendaftaran ini, yaitu kembali munculnya pasangan calon tunggal. Kejadian ini mengulang peristiwa yang terjadi pada dua pemilihan kepala daerah serentak sebelumnya, yakni pada 2015 dan 2017.

Pada pemilihan kepala daerah 2015 yang digelar di 269 daerah, tiga daerah menggelar pemilihan kepala daerah dengan hanya satu pasangan calon. Jumlah ini meningkat di pemilihan kepala daerah serentak dua tahun berikutnya yaitu tahun 2017. Dari 101 daerah yang melakukan pemilihan, jumlah pasangan calon yang melawan kotak kosong menjadi sembilan pasangan. Pada tahun 2018 ini jumlah calon tunggal lebih banyak, ada 11 pasangan, atau meningkat dibanding tahun lalu. Tiga calon tunggal terdapat di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Lebak.

Di Kota Tangerang pasangan Arief Wismansyah-Sachrudin bisa melaju tanpa penantang. Pasangan ini sama sekali tidak memiliki penantang karena 10 partai

¹⁹ R. Nazriyah, *Op. Cit*, hlm 386

berkumpul mendukungnya. Bahkan ada dua partai non-parlemen yang ikut mendukung. Di Kabupaten Tangerang, pasangan Ahmed Zaki Iskandar-Mad Romli juga tanpa penantang. Ahmed Zaki adalah bupati petahana. Pasangan ini mendapat dukungan total 12 partai dengan total 50 kursi di DPRD. Di Kabupaten Lebak. Pasangan petahana Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi juga tidak memiliki penantang. Daerah lain yang juga memiliki calon tunggal antara lain Pidie Jaya (Aceh), Kerinci (Jambi), Kota Palembang, Kota Prabumulih (Sumatera Selatan), Purwakarta, Kota Banjar (Jawa Barat), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Sinjai (Sulawesi Selatan), serta Puncak (Papua).

Fenomena calon tunggal Pemilihan kepala daerah menimbulkan polemik dan pro-kontra sejak 2015. Kondisi itu yang membuat sejumlah warga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada September 2015, MK akhirnya memutuskan calon tunggal diperbolehkan di pemilihan kepala daerah, namun KPU harus tetap berupaya menciptakan kontestasi, salah satunya dengan membuka kembali pendaftaran calon di daerah bersangkutan. KPU menyediakan waktu tiga hari bagi partai politik yang belum memiliki calon untuk kembali membangun koalisi sebelum mendaftar ke KPU. Maraknya calon tunggal menjadikan partai politik sebagai sasaran kritik. Partai dinilai terlalu pragmatis mengejar kemenangan dan kekuasaan dan mengabaikan kepentingan rakyat yang seharusnya diberi pilihan calon pemimpin. Hampir seluruh calon tunggal di pemilihan kepala daerah adalah petahana yang berkuasa.

Namun, pemilihan kepala daerah serentak ini juga menyisakan permasalahan, yaitu apabila ada yang tidak mendukung pasangan calon tunggal yang ada. Memang ada opsi yang disediakan bagi pemilih saat pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS), yakni “setuju” atau “tidak setuju” dengan pasangan calon yang gambarnya ada

di kertas suara. Namun, belajar dari pengalaman sebelumnya, semua calon tunggal menang telak atas kotak kosong yang menjadi lawannya dengan perolehan suara meyakinkan, yakni di atas 60%. Hingga pemilihan kepala daerah serentak tahap ketiga pada 2018 ini, belum ada solusi konkret yang bisa disepakati pemerintah maupun DPR dalam upaya mencegah calon tunggal. Pemerintah saat mengajukan draf revisi UU Pemilihan Kepala Daerah ke DPR pada 2016 lalu sempat memuat aturan sanksi bagi parpol yang tidak mengajukan calon. Itu diatur pada Pasal 203 ayat (5). Pasal tersebut berbunyi: “Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan bakal Pasangan Calon, maka partai politik bersangkutan dikenakan sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.” Namun, ketentuan ini mendapat penolakan dari fraksi-fraksi di Komisi II DPR sehingga pasal tersebut tidak jadi diundangkan.

Calon tunggal ini dinilai berbahaya bagi demokrasi. Calon tunggal mengandaikan tidak ada kompetisi. Padahal, semakin banyak calon yang bersaing, kualitas demokrasi akan semakin baik, tetapi banyaknya pasangan calon yang tampil dalam pemilihan kepala daerah juga akan menimbulkan persoalan antara lain, menyulitkan pemilih untuk mengenali masing-masing pasangan calon, sehingga pemilih terdorong untuk tidak rasional dalam menjatuhkan pilihannya. Dari sisi efektifitas pemerintahan, jumlah pasangan calon terlalu banyak menyebabkan fragmentasi politik di DPRD sangat tinggi, sehingga hal ini mempengaruhi efektifitas pengambilan kebijakan pemerintahan pasca Pemilihan kepala daerah, karena pasangan calon terpilih harus berhadapan dengan banyak fraksi atau faksi dalam DPRD. Pada akhirnya kebijakan yang diambil bukan berdasarkan kepentingan rakyat banyak, melainkan berdasarkan politik “dagang sapi” antara kepala daerah dengan DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya fenomena pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan calon tunggal yang diselenggarakan di Kota Tangerang tahun 2018.

B. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan memberikan referensi bagi penelitian hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait, terutama yang berhubungan dengan masalah pemilihan kepala daerah serentak.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Suatu penelitian yuridis normatif tentu harus meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan.²⁰ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut patut dengan isu hukum yang diketengahkan.²¹ Penulis akan mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan baik yang berasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan KPU Daerah yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, karena penelitian ini menggambarkan atau melukiskan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat, yang kemudian analisis data yang diperoleh dari penelitian. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan meyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan analitis mengandung maksud mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna.

²⁰ Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 110.

Deskriptif di sini adalah menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan, yaitu pemilihan kepala daerah serentak dengan calon tunggal. Dari penggambaran tersebut diambil suatu analisis yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para sarjana berupa kesimpulan yang bersifat analitis.

C. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap peraturan ataupun tulisan yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder meliputi studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian. Selain itu dimungkinkan pula dibutuhkan data primer yang berupa keterangan atau penjelasan dari para ahli/pejabat/masyarakat dalam rangka untuk menjelaskan apa-apa saja yang terdapat dalam data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

1. Bahan hukum primer terdiri atas :

a. Peraturan Perundang-undangan yang relevan, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang merupakan karya sarjana dan hasil dari berbagai penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Jadi bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berhubungan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara Studi Kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi bahan penelitian hukum. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Selain itu, juga dilengkapi dengan wawancara sebagai klarifikasi data sekunder. Wawancara dilakukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tangerang.

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, setelah dikumpulkan akan disusun secara sistematis kemudian dianalisis. Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dilakukan untuk mencapai kejelasan dari permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun secara sistematis sebagai karya ilmiah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Fenomena Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal.

Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak yang diakomodir DPR dan Presiden, hampir setiap tahun Indonesia disibukkan dengan berbagai dinamika pemilu/pemilihan kepala daerah. Ada satu fenomena yang menarik untuk dikaji dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang sudah masuk ke tahap penyaringan bakal calon. Dari 171 daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah, ada 14 daerah yang hanya memiliki 1 pasangan bakal calon. Hal ini menggambarkan adanya bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia.

Realitas keberadaan calon tunggal ini, sesungguhnya tidak lepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang mengakomodir eksistensi Pasangan Calon Tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Seperti dipahami, sebelumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah mewajibkan adanya minimal dua pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, namun ternyata pasal ini menimbulkan permasalahan karena banyak daerah yang terancam batal menyelenggarakan pemilihan kepala daerah karena hanya ada satu pasangan calon kepala daerah. Padahal masa jabatan kepala daerah sebelumnya sudah berakhir, dan keberadaan Penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri memiliki wewenang yang sangat terbatas, artinya pemilihan kepala daerah tetap harus diselenggarakan.

Keberadaan norma ini sesungguhnya bukan tanpa landasan filosofis dan yuridis. Ada alasan logis mengapa pembuat undang-undang mengharuskan adanya minimal dua pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, yaitu kekhawatiran terjadinya

pembajakan demokrasi oleh orang-orang yang memiliki kuasa penuh di daerah-daerah. Namun, pasca diakomodirnya Putusan MK mengenai calon tunggal ini, masalah tidak selesai namun justru menjadi semakin rumit. Banyak daerah hanya memiliki satu pasang calon kepala daerah.

Di berbagai negara, pemilihan tanpa kontestasi (uncontested election) lazim terjadi. Di Amerika Serikat, antara tahun 1978 sampai 1988, 14% pemilihan untuk mengisi House of Representative merupakan pemilihan tanpa kontestasi (Squire, 1989: 281). Pemilihan Presiden Irlandia pada tahun 1938, 1952, 1974, 1976, 1983 dan 2004 hanya menghadirkan satu kandidat (ElectionsIreland.org: 2015). Di Indonesia, sejarah pelaksanaan pemilihan kepala daerah belum pernah diwarnai dengan kehadiran pasangan calon tunggal²², sehingga menjadi sesuatu yang mewarnai pelaksanaan demokrasi.

Dari aspek yuridis, sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif, justru dipandang sebagai sesuatu yang baik karena meminimalkan potensi konflik, namun dari segi pertumbuhan demokrasi menjadi jalan di tempat, karena calon tunggal ini hampir dapat dipastikan akan terpilih. Padahal di daerah-daerah yang tingkat melek politiknya masih rendah serta medianya belum begitu baik, menjadi calon tunggal bukanlah perkara sulit. Dengan kuasa yang dimilikinya, seseorang dengan mudah dapat ‘membeli’ suara dari semua partai di daerahnya sehingga tidak ada calon lain yang muncul. Hal ini tentunya menjadikan pemilihan kepala daerah menjadi tidak menarik lagi.

Terkait dengan fenomena di atas, penulis mencatat ada beberapa penyebab munculnya fenomena pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, sebagai berikut:

²² Firman Manan, “Pemilihan Kepala Daerah Dengan Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan kepala daerah Serentak 2015”, *Conference Paper*, Desember 2015, hlm 2

1. Petahana memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi.

Faktor kehadiran petahana (*incumbent*) menyebabkan jumlah kandidat yang ikut berkompetisi cenderung lebih sedikit. Hal ini dipicu oleh kondisi keunggulan petahana, berupa keunggulan dalam kemampuan visibilitas, pengalaman, organisasi, serta penggalangan dana yang menyulitkan kandidat lain untuk mengalahkannya (Wright, 2006: 177).²³ Keengganan untuk bertarung menghadapi petahana dalam pemilihan kepala daerah tergambarkan dengan melihat pasangan calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten, baik pemilihan Gubernur Banten, pemilihan Bupati Tangerang dan pemilihan Walikota Tangerang, dimana seluruh calon yang maju berstatus petahana, dan mendapat dukungan suara dari masyarakat $\pm 70\%$ suara, mengungguli kotak kosong. Masyarakat menilai bahwa petahana telah berhasil memajukan daerahnya sehingga hal ini membuat masyarakat enggan memilih calon lain yang belum terlihat kontribusinya bagi daerahnya.

2. Mahalnya mahar politik dari partai yang mengusung.

Selain itu, calon tunggal ini lahir karena mahalnya mahar dari partai pengusung. Secara rasional, jika ada calon petahana yang kuat, calon lain pasti akan berkalkulasi rasional. Daripada hilang segalanya, lebih baik mengurungkan niat untuk jadi calon. Hal ini dikarenakan untuk menjadi calon saja mereka sudah harus membayar mahar. Belum lagi dana yang akan digunakan untuk kampanye, dana untuk meraih suara pemilih, dana untuk mengamankan suara mulai dari tingkat TPS sampai mengamankan suara di KPU, KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi.²⁴

3. Beratnya persyaratan dukungan terhadap calon melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan.

²³ *Ibid*, hlm 5-6

²⁴ Iza Rumesten RS, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016, hlm 80

Calon perseorangan pada mulanya adalah alternatif lain bagi seseorang yang layak menjadi kepala daerah namun tidak memiliki basis dukungan partai, termasuk mengatasi fenomena calon tunggal. Namun dengan persyaratan yang semakin berat hingga membutuhkan dukungan mencapai 6,5% sampai 10% jumlah penduduk mempersulit kandidat-kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah melalui jalur perseorangan. Hal tersebut berkonsekuensi pada sedikitnya jumlah pasangan calon dari jalur perseorangan yang berhak mengikuti pemilihan kepala daerah. Tidak hanya syarat calon perseorangan saja yang meningkat tetapi syarat dukungan dari jalur parpol juga naik menjadi 30%.

Hal ini sebaiknya perlu ditinjau ulang karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang baru belajar berdemokrasi, sehingga belum siap memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang.

4. Fungsi partai politik tidak berjalan.

Di luar sisi hukum dan aturan lainnya yang kini membolehkan pasangan calon tunggal, ada ironi demokrasi yang mengemuka dari fenomena ini. Ironi itu ialah masih abainya peran partai politik dalam menyediakan sarana yang kompetitif dalam pemilihan kepala daerah. Beberapa daerah yang kini hanya diisi paslon tunggal di daerah, rata-rata karena fenomena pasangan calon memborong dukungan dari hampir mayoritas partai, dan tidak menyisakan dukungan untuk yang lainnya. Pada pemilihan kepala daerah Kota Tangerang tahun 2018 ini, misalnya, pasangan H. Arief Rachadiono Wismansyah dan Drs. H. Syachrudin yang diusung oleh semua partai politik peserta pemilihan umum (10 partai politik) di DPRD setempat.

Hal itu berarti semua kursi partai di DPRD memberikan rekomendasi terhadap pasangan ini. Sebagaimana diketahui, partai dan atau gabungan partai yang akan mengusung pasangan calon ada persyaratan kursi. Dengan jumlah kursi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang 50 kursi, maka untuk dapat mengusulkan bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mesti memiliki paling sedikit 10 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang. Pasangan H. Arief Rachadiono Wismansyah dan Drs. H. Syachrudin praktis tidak menyisakan calon lainnya.

Ironisnya, meskipun secara hukum dan prosedural pasangan calon tunggal bisa tetap dipilih meski lawan kotak kosong, secara substansial ada ruang penyelenggaraan pemilihan yang sangat tidak kompetitif. Dalam jangka panjang, fenomena ini harusnya dievaluasi seluruh partai yang ada di Indonesia. Pemilihan kepala daerah tidak semata-mata melihat pada prosedural dan instrumental saja, tetapi juga harus menguatkan aspek substansialnya. Pasangan lebih dari satu membuat adu konsep, adu gagasan, ruang dialektika, dan juga akan menghadirkan banyak sekali panggung yang menguji kapasitas dan kapabilitas calon pemimpin daerah.

Adanya pasangan calon tunggal menunjukkan bahwa partai politik telah gagal dalam melakukan fungsinya, yaitu kaderisasi yang baik dan memberikan pendidikan politik pada kader-kadernya sehingga tidak melahirkan banyak calon kepala daerah. Partai juga gagal dalam meyakinkan tentang perubahan dirinya pada rakyat. Pemilihan kepala daerah yang demikian menggambarkan bahwa pemilihan kepala daerah secara serentak telah dilaksanakan tetapi tidak meningkatkan kualitas dan mengubah sistem, tetapi hanya mengubah persoalan teknis saja yaitu dengan dibuat serentak.

5. Didominasi oleh para elite partai politik.

Besarnya pengaruh elite-elite partai politik di tingkat pusat untuk menentukan dukungan pada kandidat dalam pemilihan kepala daerah menjadi hambatan bagi

kandidat-kandidat potensial untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Praktik oligarki partai menyebabkan penentuan kandidat yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah sepenuhnya ditentukan oleh elite-elite partai politik. Saat membangun koalisi dalam memajukan kandidat, partai politik seringkali terlalu nyaman dengan perspektif elite, bukan dalam kesadaran penguatan dan konsolidasi demokrasi.

Beberapa elite partai politik dengan mudah berargumentasi tidak ingin mengambil risiko memajukan kandidat yang berpotensi kalah. Logika ini tentu saja dangkal dan menggelikan. Bukankah dari awal seharusnya partai politik mencari dan menyeleksi sejumlah orang di dalam maupun di luar partai politik yang memiliki basis dukungan nyata di masyarakat. Tidak mudah memang, tetapi sebenarnya partai politik punya waktu sangat panjang dan leluasa untuk mengidentifikasi sejumlah anak bangsa yang memiliki kapasitas, rekam jejak dan memenuhi prasyarat perhelatan demokrasi *electoral*, seperti disukai, diterima, populer, dan memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi.

Partai susah mendapatkan orang terbaik yang bisa bertarung karena mereka seringkali mengabaikan proses panjang. Merekanya seringkali menginginkan proses pencalonan berjalan instan, menghasilkan uang dan berpotensi menang. Proses belum berjalan alamiah bergerak dari bawah. Logika elite masih dominan sehingga penunjukan atau rekomendasi berjalan linear, dari pusat ke daerah tanpa sebuah proses komunikasi timbal balik yang memadai. Dampaknya, di beberapa daerah ditemukan sejumlah masalah, antara lain sulitnya mencari kandidat kuat yang siap menjadi petarung sejati, bukan petarung bayangan.

B. Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dengan Calon Tunggal Di Kota Tangerang Tahun 2018.

1. Tahap Persiapan.

a. Perencanaan program dan anggaran.

Perencanaan program dan anggaran di Kota Tangerang merupakan salah satu tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah. Kemudian, Komisi Pemilihan Umum setiap Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah tersebut melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran anggaran yang akan digunakan. Kota Tangerang sendiri, dimulai dengan perencanaan program dan anggaran pada bulan Juli sampai dengan 27 September 2018.

b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan.

Kegiatan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serentak di Kota Tangerang pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. Peraturan-peraturan yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagai Peraturan teknis penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serentak di Kota Tangerang pada tahun 2018, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan walikota menjadi Undang-Undang
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - 10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan.

Pada tahapan ini, Komisi Pemilihan Umum telah membuat jadwal sedemikian rupa mengenai Pemilihan di mana mulai dari membuat panitia-panitia kecil sampai pada pelaksanaan Pemilihan tersebut. Berikut merupakan lampiran jadwal yang tertera sebagai acuan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2018.

Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/II/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 39/HK.03.1/Kpts/3671/Kota/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 1
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang
Tahun 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
TAHAP PERSIAPAN			
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		
	a. Perencanaan Program dan Anggaran KPU Kota Tangerang		3 Juli 2017
2	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)	21 Juli 2017	21 Juli 2017
3	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		
	a. Bimtek legal drafting	22 September 2017	24 September 2017
	b. Raker perancangan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis	28 September 2017	30 September 2017
4	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	30 April 2016	14 Februari 2017
	a) Sosialisasi	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b) Sayembara jingle pemilihan	1 Agustus 2017	31 Agustus 2017
	c) Maskot dan jingle pemilihan	1 Agustus 2017	Agustus 2017
	d) Audiensi dengan stake holder	1 Juli 2017	30 Juli 2017
	e) FGD evaluasi pemilihan (dengan stake holder)/KPU	21 Agustus 2017	21 Agustus 2017
	f) Launching pemilihan	1 November 2017	30 November 2017
	g) KPU goes to campus	1 November 2017	20 April 2018

	h) KPU goes to school.	1 November 2017	16 April 2018
	i) Relawan demokrasi	1 Februari 2018	31 Juli 2018
	j) Sosialisasi kepada Guru PKN	1 November 2017	20 April 2018
	k) Sosialisasi di tingkat PPK	1 November 2017	20 April 2018
	l) Sosialisasi di tingkat PPS	1 November 2017	20 April 2018
	m) Sosialisasi kepada stakeholder	16 Oktober 2017	19 Maret 2018
	n) Sosialisasi Undang-Undang/PKPU, Juklak/Juknis	1 Februari 2018	28 Februari 2018
	o) Sosialisasi Mutarlih	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	p) Gerak jalan sehat	29 April 2018	29 April 2018
	q) Fun bike	1 April 2018	1 April 2018
	r) Wawar	1 Juni 2018	26 Juni 2018
	s) Lomba fotografi (jepretan kreatif dan informatif)	1 Juni 2018	26 Juni 2018
	t) Gapura “Masyarakat Sadar Pemilihan kepala daerah Kota TNG 2018”	1 Mei 2018	26 Juni 2018
	u) Publikasi	1 Juni 2017	30 Juni 2018
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, DAN KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018
	1. Pelatihan teknis pengusaha keuangan hibah Pemilu bagi penyelenggara (peserta sekretariat KPU, PPK, dan Sekretariat PPK). Pendalaman pemahaman dan penguatan bagi penyelenggara Pemilu ketentuan dan peraturan dan pertanggungjawaban dana hibah Pemilihan kepala daerah.	1 November 2017	31 Desember 2017
	2. Pelatihan/bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.	1 November 2017	31 Desember 2017

	3. Pelatihan/Bimtek pengendalian dan distribusi logistik	24 Mei 2018	24 Mei 2018
	4. Bimtek penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM penyelenggara pemilu kepala daerah.	1 September 2017	30 September 2017
	5. Bimtek penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM penyelenggara pemilu kepala daerah (PPK)	1 November 2017	30 November 2017
	6. Bimtek pemutakhiran data pemilih		
	a. Bimtek pemutakhiran data dan daftar pemilih, penyusunan peta wilayah cokolit tingkat PPK.	1 Januari 2018	31 Januari 2018
	b. Bimtek pemutakhiran data dan daftar pemilih, penyusunan peta wilayah cokolit tingkat PPS.	1 Januari 2018	31 Januari 2018
	c. Bimtek pemutakhiran data dan daftar pemilih, penyusunan peta wilayah cokolit tingkat PPDP.	1 Januari 2018	31 Januari 2018
	7. Bimtek permasalahan pemilu dan sengketa hasil perselisihan hasil pemilu walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2018.	16 Mei 2018	16 Mei 2018
	8. Bimtek pemungutan suara:		
	a. Bimtek pemungutan suara PPK.	29 Mei 2018	29 Mei 2018
	b. Bimtek pemungutan suara PPS.	30 Mei 2018	30 Mei 2018
	c. Bimtek pemungutan suara KPPS.	3 Juni 2018	3 Juni 2018
5	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	1 November 2017

	b. Pembentukan PPS	12 Oktober 2017	11 November 2017
	c. Pembentukan KPPS	3 April 2018	30 Mei 2018
6	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantauan Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 November 2017	27 November 2017
	b. Analisis DP4	28 November 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kota Tangerang	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Tangerang dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	11 Januari 2018
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan PPDP	19 Desember 2017	30 Desember 2017
	2) Penyusunan peta lokasi cokolit oleh PPS atau PPDP	13 Januari 2018	17 Januari 2018
	3) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	4) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	28 Februari 2018
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	6 Maret 2018	7 Maret 2018
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada	8 Maret 2018	26 Oktober 2016

	KPU Kota Tangerang		
	7) Sampling/uji petik hasil coklit di 104 TPS	10 Maret 2018	14 Maret 2018
	8) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat KPU Kota Tangerang untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	15 Maret 2018	16 Maret 2018
	9) Penyampaian DPS kepada PPS	22 Maret 2018	23 Maret 2018
	10) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	11) Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	13) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kota Tangerang	11 April 2018	12 April 2018
	14) Daftar Pemilih Tetap (DPT):		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat KPU Kota Tangerang untuk ditetapkan sebagai DPT	17 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampain DPT kepada PPS	28 April 2018	29 April 2018
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
PENYELENGGARAAN			
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	10 September 2017	10 September 2017

	sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan		
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 November 2017	22 November 2017
	d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	18 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	e. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang	25 November 2017	29 November 2017
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	25 November 2017	1 Desember 2017
	3) Penelitian administrasi dan Analisis dukungan ganda	25 November 2017	5 Desember 2017
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	g. Penelitian faktual di tingkat kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	i. Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Tangerang	29 Desember 2017	31 Desember 2017
2	PENDAFTARAN		

	PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	d. Sosialisasi penundaan tahapan	11 Januari 2018	13 Januari 2018
	e. Perpanjangan pendaftaran pasangan calon	14 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Pemeriksaan kesehatan pasca perpanjangan pendaftaran	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	g. Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	17 Januari 2018	20 Januari 2018
	h. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	17 Januari 2018
	i. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan Gabungan partai politik	8 Januari 2018	16 Januari 2018
	1) Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai dan Gabungan partai politik	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	2) Penelitian	17 Januari	18 Januari 2018

	syarat pencalonan dan syarat calon	2018	
	j. Pemberitahuan hasil penelitian	19 Januari 2018	19 Januari 2018
	k. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang kepada KPU Kota Tangerang	20 Januari 2018	22 Januari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	20 Januari 2018	22 Januari 2018
	l. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	22 Januari 2018	26 Januari 2018
	m. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Tangerang:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	21 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	21 Januari 2018	26 Januari 2018

	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kota Tangerang kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) Penelitian faktual di tingkat kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat KPU Kota Tangerang	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	23 Januari 2018	27 Januari 2018
	n. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	o. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslu Kota Tangerang	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kota Tangerang ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	

	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Kota Tangerang wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 hari sebelum hari pemungutan suara.	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Kota Tangerang wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 hari sebelum hari pemungutan suara	
4	MASA KAMPANYE		
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain.	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018

	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dan kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Tangerang	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan	11 April 2018	26 Juni 2018

	pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	c. Penggandaan barang cetakan/penggunaan	18 September 2018	17 Mei 2018
	d. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya	17 April 2018	17 Mei 2018
	e. Distribusi-PP (termasuk bongkar muat)	28 Mei 2018	3 Juli 2018
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada	27 Juni 2018	29 Juni 2018

	PPK		
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kota Tangerang	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat KPU Kota	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	d. Rekapitulasi dan pengumuman hasil perhitungan suara tingkat KPU Kota	4 Juli 2018	6 Juli 2018
9	PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Setelah MK mencantumkan permohonan PHP dalam Bulru Registrasi Perkara	
10	SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Tanpa	Paling lama 3 hari setelah penetapan,	

	permohonan PHP	putusan dismissal atau putusan MK dibacakan
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11
13	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN	
	a. Tanpa permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2

d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dibantu beberapa panitia dalam penyelenggaraan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang. Dibentuklah panitia yang bertugas membantu dalam melaksanakan pemilihan diantaranya dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pembukaan pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan 20 Oktober 2017 yang ditutup pada pukul 17.00 WIB. Sebanyak 130 orang warga Kota Tangerang mendaftarkan diri menjadi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tingkat PPK. Dari data yang diterima, Kecamatan Tangerang, Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan Jatiuwung menjadi kecamatan yang paling banyak peminatnya. Rata-rata pendaftarnya 12-14 orang di tiga kecamatan ini.

Selanjutnya, KPU Kota Tangerang melakukan serangkaian verifikasi dan ujian bagi para pendaftar. Pertama, dilakukan verifikasi administrasi, kemudian ujian tertulis, yang juga bersamaan dengan itu dilakukan tanggapan masyarakat atas mereka yang lulus ujian tulis, kemudian yang lolos ujian tertulis maju pada ujian wawancara, dan terakhir baru dinyatakan lulus menjadi PPK pada tanggal 30 Oktober 2017, KPU Kota Tangerang hanya akan menerima 65 orang PPK untuk Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang, dimana, kebutuhannya 5 orang untuk tiap kecamatan. Serangkaian verifikasi dan ujian dilakukan demi mendapatkan penyelenggara yang berintegritas dan semakin berkualitas. Proses pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota PPK Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang diwarnai dengan sejumlah aksi-aksi menarik. Mulai dari aksi motivasi dan tepuk pramuka. Calon anggota PPK terpilih sebanyak 65 orang ditetapkan dan dikukuhkan menjadi PPK di 13 Kecamatan se-Kota Tangerang pada tanggal 1 November 2017.

Terkait dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS), panitia ini dibentuk melalui seleksi berupa seleksi tertulis dan wawancara. Pembukaan pendaftaran PPS dimulai pada 21 Oktober 2017 hingga 4 November 2017. Tercatat ada 481 calon anggota PPS yang terdaftar. Calon PPS sudah dijadwalkan untuk mengikuti seleksi tertulis pada 7 November 2017. Selanjutnya mereka yang lulus dalam seleksi tersebut mengikuti seleksi wawancara yang digelar di masing-masing PPK pada tanggal 8-9 November 2018. Mereka yang lulus seleksi tertulis bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu seleksi wawancara. Penentuan lulus tidaknya para calon PPS ini sebagai PPS terpilih baru ditentukan pada tanggal 10 November 2017 dan diumumkan di kantor Kecamatan serta media sosial resmi masing-

masing PPK. Adapun waktu pelantikan bagi para PPS terpilih dilaksanakan secara serentak pada tanggal 11 November 2017.

Pelantikan 312 anggota PPS dari 104 kelurahan ini dilaksanakan di 5 lokasi berbeda. Meski dilantik di 5 tempat berbeda, namun pelantikan dilaksanakan serentak pada tanggal 11 November 2017. Lokasi pelantikan dibagi menjadi 5 titik karena jumlah PPS yang cukup banyak dan untuk efisiensi. Jadi, 5 komisioner KPU Kota Tangerang yang bergerak ke 5 titik tersebut untuk melantik sekaligus memberikan pembekalan kepada para PPS yang dilantik. Materi pembekalan kepada PPS adalah soal tata kerja, tugas, fungsi dan kewajiban PPS dalam Pemilihan kepala daerah serentak 2018. Hal ini perlu ditegaskan kepada PPS karena kerja PPS cukup berat dan bersentuhan langsung kepada masyarakat.

Terkait titik pelantikan, untuk Wilayah 1 yakni Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Karawaci dan dihadiri Ketua KPU Kota Tangerang, yaitu Bapak Sanusi. Untuk Wilayah 2, dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Jatiuwung yang mencakup Kecamatan Cibodas, Kecamatan Jatiuwung dan Kecamatan Periuk dihadiri langsung Koordinator Wilayah (Korwil) 2, yaitu Bapak Banani Bahrul. Adapun Wilayah 3 yang mencakup Kecamatan Benda, Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Batucapeper pelantikan PPS dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Benda oleh Korwil 3, yaitu Bapak Wahyul Furqon.

Wilayah 4 yaitu Kecamatan Pinang dan Kecamatan Cipondoh. Wilayah 5 dipusatkan di Aula Kantor Kelurahan Peninggilan Utara, yakni untuk Kecamatan Larangan, Ciledug, dan Karangtengah dihadiri langsung Korwil setempat, Bapak Nurhalim. Empat wilayah ini dilaksanakan pada malam hari semua. Kecuali untuk Wilayah 4, yaitu Kecamatan Pinang dan Kecamatan Cipondoh dilaksanakan

terpisah. PPS se Kecamatan Pinang pada siang hari, dan Kecamatan Cipondoh pada malam hari oleh Korwil 4, yaitu Bapak Ahmad Syailendra.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota. Pembentukan KPPS berlangsung dari tanggal 3 April 2018 sampai dengan 30 Mei 2018.

e. Sosialisasi kepada Masyarakat

Terhitung sejak awal Februari hingga Mei 2018, KPU telah terjun langsung ke 104 Kelurahan yang ada di Kota Tangerang untuk mensosialisasikan Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang 2018. KPU Kota Tangerang sudah merancang sebanyak 416 kegiatan sosialisasi tatap muka kepada masyarakat tingkat kelurahan, dimana dari 104 kelurahan se Kota Tangerang, masing-masing mendapatkan 4 kegiatan sosialisasi. Dari 4 segmen kegiatan di tingkat kelurahan

itu, anggarannya diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat, dimana segmentasi yang menjadi target sosialisasi adalah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemilih pemula, dan pemilih perempuan. Rancangan ini dibuat untuk memenuhi target 78 persen partisipasi pemilih. Dalam sosialisasi ini, 5 komisioner KPU terjun langsung melakukan sosialisasi didampingi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS.

Gambar 1.
Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang
di Kelurahan Suka Asih Kecamatan Tangerang



Tidak hanya sosialisasi ke kelurahan saja dilakukan oleh KPU Kota Tangerang tetapi sosialisasi juga dilakukan terhadap kampus dan sekolah. Bahkan, kegiatan sosialisasi dikemas dalam bentuk yang lain, seperti Funbike, gerak jalan sehat, mengadakan lomba fotografi, sayembara jingle dan maskot, dan hias gapura dalam rangka “masyarakat sadar Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang 2018.

Hal menarik yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang dalam mensosialisasikan gerakan “Saya mencoblos” untuk Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang 2018 adalah dengan menggandeng puluhan guru silat Betawi se-

Kecamatan Larangan di Kantor Kecamatan Larangan pada tanggal 6 Januari 2018. KPU Kota Tangerang berupaya melakukan sosialisasi Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang dari berbagai lini, termasuk seni budaya, untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang 2018. Sosialisasi Pemilihan kepala daerah harus berbasis partisipatif langsung dari masyarakat. Oleh karena itu, melalui seni silat Betawi, KPU Kota Tangerang ingin para penggiat Seni Silat Betawi juga dapat mensosialisasikan Pemilihan kepala daerah kepada masyarakat luas agar partisipasi Pemilihan kepala daerah tahun ini mencapai 78 persen.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Anggota Panwaslu Kota Tangerang, Sesepuh Perguruan Silat Betawi, Sekretaris Camat (Sekcam) Larangan. Selain menampilkan jurus Beksi dari ratusan murid silat, juga dilakukan penyebaran selebaran tanggal dan waktu coblos Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Larangan.

Gambar 2.
Dua orang Pesilat Betawi saat memperagaan jurus dalam sosialisasi Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang 2018 di Kantor Kecamatan Larangan



Menjelang hari pemilihan, KPU Kota Tangerang masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih, yaitu dengan melakukan War-War (Woro-Woro) Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang 2018. Sebanyak 104 unit kendaraan hias melaksanakan War War jelang pelaksanaan Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang. Dengan berkeliling ke masing-masing kelurahan di 13 kecamatan, pada tanggal 23 Juni 2018 pagi. Ratusan kendaraan hias tersebut berkumpul dari depan Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang dilepas Ketua KPU Kota Tangerang, Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Tangerang, dan Kasatpol PP Kota Tangerang.

Para peserta yang mengikuti kegiatan War War ini adalah panitia penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat PPS, PPK, hingga KPU Kota Tangerang. Di Kota Tangerang terdapat 13 kecamatan dengan 104 kelurahan. Rangkaian kendaraan hias sosialisasi Pemilihan kepala daerah ini merupakan yang kedua kali dilaksanakan KPU Kota Tangerang. Sebelumnya pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Banten 2017, kemudian yang kedua Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang 2018. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan maksud tiga hal. Pertama, sampaikan kepada masyarakat kota Tangerang dan dunia internasional bahwa kita siap mewujudkan Pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil. Kedua, sampaikan kepada masyarakat Kota tangerang dan dunia internasional bahwa kita sudah siap mewujudkan demokrasi, Pemilihan kepala daerah yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat. Ketiga, sampaikan kepada dunia internasional pada tanggal 27 Juni 2018 Kota Tangerang akan kedatangan tamu internasional.

- f. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL merupakan petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain Kelurahan. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Bawaslu Provinsi Banten meminta seluruh Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota merekrut Panitia Pengawas Kecamatan melalui Instruksi

Pembentukan Panwaslu Kecamatan Nomor 166/K/BT/HM.03.02/IX/2017, yang dibebankan pada APBD sebagaimana dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Kota Tangerang sendiri melakukan seleksi tertulis rekrutmen Panwascam pada tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017.

Kegiatan rekrutmen PPL Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang 2018 dimulai dari pengumuman pendaftaran pada tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, yang dilanjutkan dengan penerimaan pendaftaran dan berkas pada tanggal 1 Januari sampai dengan 7 Januari 2018. Kegiatan rekrutmen PPL ini dimotori oleh Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam). Rekrutmen PPL ini lebih ditekankan mencari PPL yang berintegritas. Hal ini dilakukan karena seringkali tindakan dugaan pelanggaran ada di tingkat bawah, artinya resistensi biasanya terjadi persoalan-persoalan money politik, seperti pembagian sembako, pemasangan alat peraga kampanye, dan lain sebagainya, sehingga peran PPL ini sangat besar karena PPL ini lebih bekerja di lapangan. Selain itu, rekrutmen PPL ini juga mengutamakan PPL yang bisa menguasai wilayah supaya mereka secara kewilayahan mengerti sehingga pengawasannya menjadi efektif karena memahami letak geografis.

g. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan Pemilihan.

Pelaksanaan pemilihan dapat dipantau oleh pemantau pemilihan. Pemantau pemilihan meliputi organisasi kemasyarakatan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah dan lembaga pemantau pemilihan asing. Dalam rangka mewujudkan asas keterbukaan dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018 yang demokratis, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang

membuka pendaftaran lembaga pemantau dan lembaga survei/jejak pendapat untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018. Pendaftaran dibuka mulai Tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018. Aturan mengenai pemantau dijamin dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Pasal 30 ayat (2), sedangkan Lembaga Survei dijamin dalam PKPU yang sama pada Pasal 48 ayat (1).

h. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, merupakan data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri kemudian diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018, penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kota Tangerang berlangsung pada tanggal 26 Desember 2017 hingga 29 Desember 2017.

i. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan mulai tanggal 20 Januari 2018 hingga 18 Februari 2018. Sebelum dilakukan pemutakhiran dibentuk terlebih dahulu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang dimana petugas ini diberikan pembekalan terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan. Selain ada PPDP yang ditugaskan di lapangan, KPU Kota Tangerang juga telah membentuk Satgas Data Pemilih yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemutakhiran. Satgas ini terdiri dari KPU, PPK, PPS, dan juga dinas kependudukan setempat. Satgas ini akan mengontrol dan menerima laporan mengenai adanya kegiatan pendataan yang tidak sesuai.

Berikut adalah rekapitulasi data pemilih tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Tangerang Tahun 2018

No.	NAMA WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A	KOTA TANGERANG	514.146	513.376	1.027.522
I	KECAMATAN TANGERANG	45.832	45.649	91.481
II	KECAMATAN KARAWACI	53.698	54.146	107.844
III	KECAMATAN CIBODAS	39.836	40.750	80.586
IV	KECAMATAN JATIUWUNG	26.348	25.632	51.980
V	KECAMATAN PERIUK	39.124	38.571	77.695
VI	KECAMATAN BATUCEPER	25.311	24.978	50.289
VII	KECAMATAN NEGLASARI	34.226	33.096	67.322
VIII	KECAMATAN BENDA	22.919	22.046	44.965
IX	KECAMATAN CIPONDOH	60.688	60.207	120.895
X	KECAMATAN PINANG	49.962	50.219	100.181

XI	KECAMATAN CILEDUG	39.912	40.558	80.470
XII	KECAMATAN KARANG TENGAH	33.110	33.351	66.461
XIII	KECAMATAN LARANGAN	43.180	44.173	87.353

2. Tahap Penyelenggaraan

a. Pengumuman Pendaftaran Calon

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang mengumumkan pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Tangerang sesuai dengan jadwal yaitu pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 7 Januari 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/II/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 39/HK.03.1/Kpts/3671/Kota/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018.

Namun, pada tanggal 5 Januari 2018, KPU Kota Tangerang memberikan penjelasan teknis tentang tatacara pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018 kepada pimpinan partai politik se-Kota Tangerang melalui rapat koordinasi (Rakor) antara pimpinan Partai Politik, KPU dan juga Panwaslu Kota Tangerang. Rakor ini bertujuan untuk menyamakan pandangan ihwal mekanisme pendaftaran pasangan calon pada Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang 2018 dengan mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.

Rakor dimulai pukul 15.30 WIB dan dihadiri oleh 6 dari 10 pimpinan dan fungsionaris partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Tangerang, Pimpinan Panwaslu Kota Tangerang dan Jajaran Komisioner KPU Kota Tangerang. KPU menjelaskan 18 jenis, nama, dan kegunaan formulir dan macam-macam dokumen yang terkait dengan calon dan 7 jenis, nama, dan kegunaan formulir dan dokumen yang terkait dengan pencalonan, serta formulir dan dokumen syarat pencalonan itu terkait dengan proses pengajuan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam kesempatan itu, KPU Kota Tangerang juga menyampikan *softcopy* berbagai formulir kelengkapan persyaratan pencalonan kepada seluruh peserta Rakor.

Selain itu, pada tanggal 25 November 2017 sampai dengan 29 November 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang telah siap menerima dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2018. Mengenai jumlah dukungan, bahwa sekurang-kurangnya 73.315 dukungan warga Kota Tangerang yang memenuhi syarat pemilih. Tidak hanya pemilih yang terdaftar di DPT pada Pilgub 2017 lalu, pemilih yang akan berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 pun dapat mendukung pasangan calon perseorangan.

Lebih teknis lagi, dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan menggunakan formulir model B.1-KWK Perseorangan yang dapat dibuat secara perorangan atau kolektif per kelurahan. Dokumen dukungan tersebut disertai dengan bukti fotokopi KTP Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Selain dokumen dukungan yang disertai fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari

Disdukcapil, calon juga menyerahkan rekapitulasi dukungan menggunakan formulir model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap kelurahan.

Dokumen dukungan berikut bukti dukungan dan rekapnya dibuat dalam tiga rangkap, satu rangkap asli dan dua rangkap salinan. Namun, sebelum menyerahkan dokumen dukungan, pasangan calon perseorangan wajib mengunggah data dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan atau SILON dengan format yang diunduh dari laman <http://excelsilon.kpu.go.id/download>. Jumlah data yang diunggah harus sama dengan dukungan yang diserahkan. Untuk mengakses SILON, pasangan calon memperoleh username dan password dari KPU Kota Tangerang yang dapat diminta oleh perwakilan atau tim pasangan calon dengan membawa surat mandat.

b. Pendaftaran Pasangan Calon

Sesuai dengan pengumuman terkait tentang pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, maka pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dibuka dari tanggal 8 Januari 2018 hingga 10 Januari 2018 di Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang pada waktu jam kerja, yaitu pukul 08.00-16.00 WIB.

Peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang adalah calon Walikota dan Wakil Walikota yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tangerang hanya terdaftar 1 (satu) pasangan calon sampai dengan waktu pendaftaran habis, yaitu H. Arief Rachadiono Wismansyah dan Drs. H. Syachrudin yang diusung oleh semua partai politik peserta pemilihan umum (10

partai politik). Sampai tanggal pendaftaran habis, tetap tidak ada calon lain yang mendaftar sehingga membuat KPU Kota Tangerang melakukan penundaan tahapan pada tanggal 11 Januari 2018 hingga 13 Januari 2018. Setelah dilakukan penundaan tahapan, diputuskan bahwa dilakukan perpanjangan pendaftaran pasangan calon yang dimulai pada tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan 16 Januari 2018, mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, meliputi:

- 1) Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
- 2) Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
- 3) Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada

publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa local atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 4) Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 5) Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 6) Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara, dari Pengadilan

Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 7) Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 8) Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 9) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 10) Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 11) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
- 12) Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik.
- 13) Pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- 14) Naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

c. Penelitian Persyaratan Pasangan Calon

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang mengumumkan persyaratan pengajuan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang dari partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018. Pengumuman tersebut mengacu kepada Keputusan KPU Kota Tangerang yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2017. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan bakal pasangan calon dengan sedikitnya memiliki 20% (dua puluh persen) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir.

Komisioner KPU Kota Tangerang Banani Bahrul menjelaskan, bahwa pemilu terakhir adalah Pemilu 2014. Dengan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang 50 kursi, maka untuk dapat mengusulkan bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mesti memiliki paling sedikit 10 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang. Namun, Bahrul juga menyampaikan, bahwa ada alternatif selain berpatokan pada jumlah kursi, yakni jumlah perolehan suara. Jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah 791.029, maka untuk dapat mengusulkan bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik paling sedikit memperoleh 197.758 suara.²⁵

Dikarenakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang hanya didapatkan 1 (satu) pasangan calon saja yang didukung oleh partai politik

²⁵ Wawancara dengan Banani Bahrul selaku Komisioner KPU Kota Tangerang pada tanggal 14 Agustus 2018.

dan gabungan partai politik, maka dilakukan penelitian syarat hanya untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, yaitu yang berlangsung pada tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018. Diikuti dengan pemberitahuan hasil penelitian pada tanggal 19 Januari 2018.

d. Penetapan Pasangan Calon

Pada tanggal 12 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menetapkan dua keputusan dalam Rapat Pleno Terbuka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2018. Keputusan pertama adalah tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan kepala daerah) dengan Satu Pasangan Calon, dan kedua menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Arief R Wismansyah-Sachrudin sebagai pasangan calon dalam Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Tahun 2018. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Ketua KPU Kota Tangerang Nomor 23/HK.01.1-Kpt/3671/KPU-Kot/II/2018 dan Keputusan Nomor 23/HK.01.1-Kpt/3671/KPU-Kot/II/2018. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2018 hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon, oleh karena itu, tahapan pengundian nomor urut pasangan calon tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang.

e. Pelaksanaan Kampanye

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara tanggung jawab.

Menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Kampanye dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Kampanye juga dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Menurut Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bentuk-bentuk kampanye adalah:

- 1) Pertemuan terbatas.
- 2) Pertemuan tatap muka dan dialog.
- 3) Debat publik/debat terbuka antarpasangan calon.
- 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum.
- 5) Pemasangan alat praga.
- 6) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik.
- 7) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa kampanye pasangan calon sudah dimulai sejak 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018. Untuk memulai gong kampanye tersebut, KPU Kota Tangerang memfasilitasi kegiatan kampanye damai tanggal 18 Februari 2018.

Kampanye yang dilakukan dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang ini sedikit berbeda, dikarenakan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka tidak dilakukan antarpasangan melainkan pasangan calon melawan kotak kosong. Masyarakat yang tidak cocok dengan pasangan calon yang ada dapat bergabung dengan kotak kosong untuk ikut berkampanye. Namun dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum belum bisa memfasilitasi masyarakat yang berkampanye untuk kotak kosong. Sebaliknya pasangan calon yang terdaftar mendapat fasilitas alat peraga kampanye.

Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang berupa debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon yang ada dengan relawan kotak kosong, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik. Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon adalah konsolidasi menemui calon pemilih dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon terlihat biasa saja karena mereka telah merasa percaya diri, serta kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon tidak diketahui oleh KPU Kota Tangerang karena tidak ada pemberitahuan ke KPU Kota Tangerang.

f. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara.

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara, salah satunya adalah surat suara. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang memastikan mencetak surat suara dengan letak kolom foto pasangan calon di sebelah kanan dan kolom

kosong tanpa gambar di sebelah kiri desain surat suara. Hal itu merupakan hasil undian penempatan kolom foto pasangan calon dan kolom kosong yang dipilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam pleno terbuka pada tanggal 15 Februari 2018.

Undian dilakukan KPU Kota Tangerang merujuk pada edaran KPU RI Nomor 160/PL.02.2-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018. Undian ini disaksikan oleh Panwaslu Kota Tangerang, tim pemenangan, pimpinan partai politik pengusung, media dan juga pihak kepolisian dan TNI. Pihak calon, tim kampanye, dan partai politik pengusung diperkenankan untuk menyampaikan hasil undian ini kepada khalayak warga pemilih saat kampanye dilakukan oleh pasangan calon, tim kampanye atau partai politik pengusung.

Gambar 3
Desain Surat Suara Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Tangerang



Hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya pasangan calon tunggal mengatur bahwa tidak menandingkan pasangan calon dengan kotak kosong, tetapi dengan pernyataan “setuju” atau “tidak setuju”. Pada pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tahun 2015 menggunakan pernyataan “setuju” atau “tidak setuju”, namun sejak tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengatur petunjuk teknis desain surat suara, dimana format surat suara terdapat gambar pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

g. Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan calon. Asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018 berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, mandiri, efektif, efisien, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Pemungutan Suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS. Penghitungan Suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

h. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Penghitungan suara di Kota Tangerang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Proses pemungutan suara dilakukan oleh pemilih melalui pencoblosan pada surat suara secara rahasia yang dilakukan pada bilik-bilik suara yang telah

disediakan oleh KPPS di Tempat Pemungutan Suara dimana pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Penghitungan suara merupakan proses penghitungan surat suara oleh kelompok penyelenggara pemilihan suara (KPPS) untuk menentukan suara sah yang diperoleh pasangan calon, surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru dicoblos. Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018, penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, masyarakat dan stakeholder adalah pihak-pihak yang perlu mengetahui tata cara pemungutan dan penghitungan suara.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, Penyelenggara Pemilihan dan Peserta Pemilihan pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya adalah pihak-pihak yang perlu mengetahui tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil tersebut.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kota Tangerang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 4 Juli 2018.

i. Penetapan calon terpilih

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. KPU Kota Tangerang menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih

dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dan parta pendukung pasangan terpilih. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.

KPU Kota Tangerang menyampaikan Berita Acara pada hari yang sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih, KPU, dan Panwas Kota Tangerang. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Tangerang paling lama 3 (tiga) setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.

j. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan

Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2018 ini tidak terjadi sengketa hasil pemilihan. Pasangan calon tunggal Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih ini mendapat suara 609.428 suara atau 84,7% dan kolom kosong mendapat suara 101.436 suara atau 14,38% Selisih suara cukup jauh di antara keduanya. Tidak ada TPS yang memperoleh suara nihil. TPS merata jumlah suaranya. Angka partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2018 cukup tinggi yaitu mencapai $\pm 70\%$. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari upaya KPU Kota Tangerang melakukan sosialisasi-sosialisasi ke tiap kecamatan dan kelurahan, mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi masyarakat, serta menggunakan media sosial untuk menarik pemilih pemula. Terbukti bahwa pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2018 mencapai $\pm 20\%$.

Tingginya perolehan suara Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih karena pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tersebut merupakan petahana sehingga peluang untuk menang cukup tinggi mengingat masyarakat Kota Tangerang telah merasakan kinerja pasangan calon tersebut saat menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebelumnya. Meskipun tetap ada masyarakat yang tidak memilih pasangan calon tersebut tetapi persentasenya sangat kecil. Terdapat pertemuan-pertemuan di antara masyarakat yang tidak mendukung petahana tersebut atau melalui media sosial, namun gerakan-gerakan tersebut tidak sampai menjadi gerakan yang sistematis, karena di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan masyarakat mengkampanyekan kolom kosong dengan syarat: tidak boleh black campaign, tidak melakukan intimidasi, dan lain sebagainya.

k. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

Menurut ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur, pengesahan dan pengangkatan calon terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Dikarenakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2018 ini tidak ada permohonan sengketa hasil kepada MK, maka pengesahan

pengangkatan Pasangan Calon terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih.

BAB VI

LUARAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini telah dikirim ke *Jurnal Quia Iustum* pada tahun 2019, yang merupakan jurnal nasional dan terakreditasi (*in review*).

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak yang diakomodir DPR dan Presiden, hampir setiap tahun Indonesia disibukkan dengan berbagai dinamika pemilu/pemilihan kepala daerah. Ada satu fenomena yang menarik untuk dikaji dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang sudah masuk ke tahap penyaringan bakal calon. Dari 171 daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah, ada 14 daerah yang hanya memiliki 1 pasangan bakal calon. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena pasangan calon tunggal di dalam pemilihan kepala daerah, antara lain:
 - a. Petahana memiliki tingkat elektabilitas tinggi.
 - b. Mahalnya mahar politik kepada partai yang mengusung pasangan calon.
 - c. Beratnya persyaratan dukungan terhadap calon melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan.
 - d. Fungsi partai politik tidak berjalan.
 - e. Didominasi oleh para elite partai politik.
2. Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terdiri dari 2 tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Persiapan terdiri dari: perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, sosialisasi kepada masyarakat,

pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan pengawas TPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

- b. Tahapan Penyelenggaraan terdiri dari: pengumuman daftar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, penelitian persyaratan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat memberikan saran, yaitu terhadap partai politik di Provinsi Banten, sebaiknya memperbaiki atau meningkatkan kaderisasi/pengkaderan anggota di dalam partai politiknya untuk meningkatkan fungsi partai politik, sehingga akan meningkatkan partisipasi anggota partai politik untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, mengingat pemilihan kepala daerah di tingkat Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang Dan Kota Tangerang semuanya diwakili oleh pasangan calon tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Arifulloh, "Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, No. 2, Mei - Agustus 2015, hlm 302
- Andy Ramses M (edt), *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia
- A.Rahman H.I, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arbi Sanit, 2009, *Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik* dalam Andy Ramses M (edt), *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firman Manan, "Pemilihan Kepala Daerah Dengan Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan kepala daerah Serentak 2015", *Conference Paper*, Desember 2015
- Hardiyanto, dkk, "Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)", *Varia Justicia*, Vol 12, No. 1, Oktober 2016, hlm 206
- Haryanto, 1984, *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta: Liberty.
- H.M Soerya Respationo, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral", *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 43, No. 3, Juli 2013
- Indra Pahlevi, dkk, 2015, *Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, hlm iii
- Iza Rumesten RS, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016.
- Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Desember 2014.
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo.
- , dkk, 2011, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

R. Nazriyah, “Calon Tunggal dalam Pemilihan kepala daerah Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hlm 381

Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pemilihan kepala daerah Serentak*, Jakarta: Expose (PT Mizan Publika).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap UUD NRI Tahun 1945.